

Catatan Atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2024

KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DAFTAR ISI

BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan.....	2
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA	
2.1. Ekonomi Makro.....	5
2.2. Kebijakan Keuangan.....	5
2.3. Pencapaian Target Kinerja.....	5
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	7
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	7
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja.....	10
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	11
4.1. Enitas Akuntansi dan Enitas Pelaporan Keuangan.....	11
4.2. Basis Akuntansi.....	13
4.3. Basis Pengukuran.....	13
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	13
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	15
5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos.....	15
BAB VI PENUTUP	
6.1. Kesimpulan.....	19
6.2. Saran.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

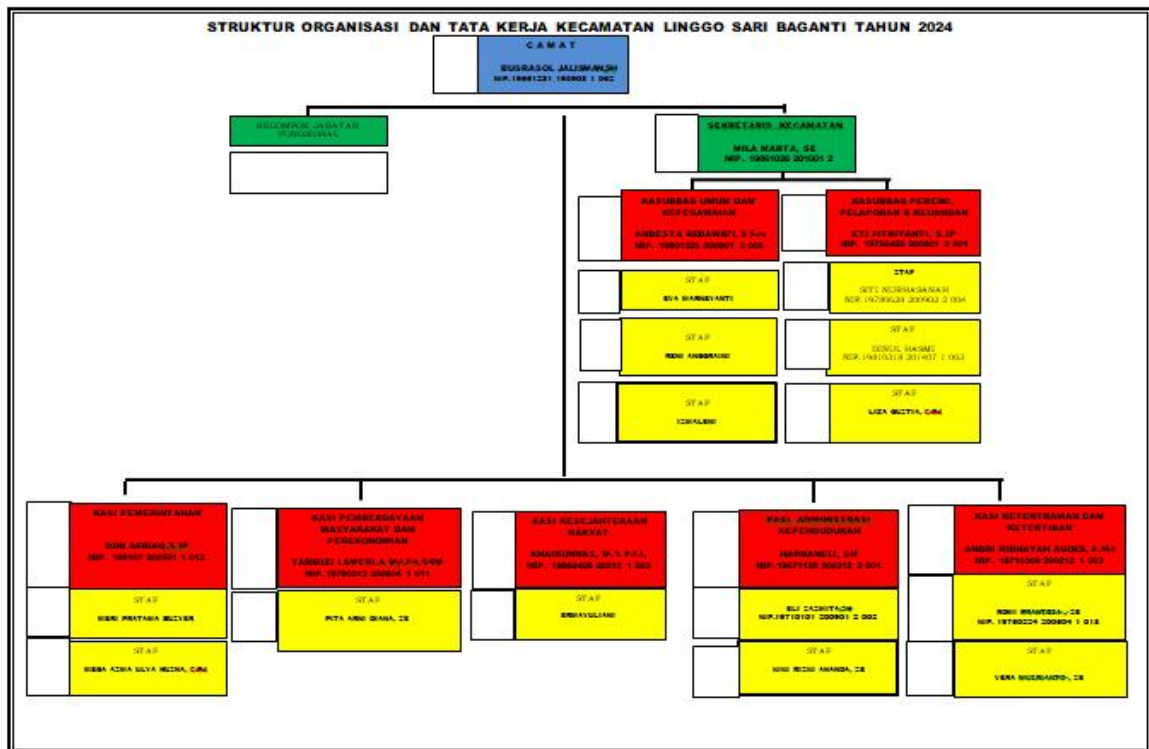
Kantor Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan struktural di Lingkungan Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kantor Camat Linggo Sari Baganti adalah instansi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

Kantor Camat Linggo Sari Baganti dipimpin oleh seorang Camat (Eselon III/a), dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon III/b,5 (Lima) orang Pejabat Struktural Eselon IV/a dan 2 (Dua) orang Pejabat Struktural Eselon IV/b, yaitu:

Sekretariat yang membawahi 2(dua) Sub Bagian, yaitu:

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1. Seksi Pemerintahan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
 - 3. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - 4. Seksi Trantib
 - 5. Seksi Pelayanan.

Struktur Organisasi Kantor Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017:



1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah upaya kongkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disampaikanlah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang direvisi menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Pada Rancangan Peraturan daerah tentang Laporan Keuangan Pemerintah daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang kinerja ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome)

dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Inpres No. 8 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 4.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 5.Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- 6.Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- 7.Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah
- 8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10.Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
- 11.Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang APBD
- 12.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penyusunan catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 6 (enam) bab, setiap bab secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Pencapaian Target Kinerja

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Enitas Akuntansi dan Enitas Pelaporan Keuangan
- 4.2. Basis Akuntansi
- 4.3. Basis Pengukuran
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

BAB VI PENUTUP

- 6.1. Kesimpulan
- 6.2. Saran

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Memuat Penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/ pengusulan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD.

Sesuai dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan Pemerintah di kecamatan, Kantor Camat Linggo Sari Baganti diharuskan mampu menyelenggarakan kewenangan urusan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan langkah :

- a) Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat dengan menerapkan Sistim Pelayanan Minimal
- b) Meningkatkan Sumber Daya Aparatur keuangan dan tenaga kepegawaian
- c) Melakukan Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pemerintahan Nagari
- d) Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah yang berimplikasi terhadap pelaksanaan program/ kegiatan unit kerja. Implikasi ini akan terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca unit kerja, dan diperbandingkan dengan periode tahun sebelumnya.

Kebijakan keuangan yang diambil yaitu kebijakan aspek belanja, dimana kebijakan di bidang pengeluaran digunakan dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung dengan efisien tanpa mengurangi kinerja yang telah ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan seperti ;

- Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran SKPD
- Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama pada program dan kegiatan yang berdampak besar untuk pelayanan masyarakat.

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD-SKPD

Program kerja Kantor Camat Linggo Sari Baganti pada Tahun Anggaran 2024 yang telah di tuangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 mencapai target sasaran sebesar

89.78%. Dengan besaran Anggaran Rp. 2.172.148.340,- Realisasi 89.78 % dengan besaran Anggaran 1.950.225.467,-.

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja dari pelaksanaan program/ kegiatan unit kerja sesuai dengan tupoksinya. Indikator keberhasilan pencapaian target kinerja adalah terciptanya efisiensi dan efektifitas dari pelaksanaan program/ kegiatan. Di samping itu juga perlu dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam mewujudkan tingkat efisiensi dan efektifitas, baik itu faktor yang bisa dikendalikan maupun yang tidak bisa dikendalikan

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi Pencapaian Target kinerja Keuangan

Berisikan penjelasan ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan (efektif dan efisien) dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD Kantor Camat Linggo Sari Baganti sebagaimana yang dijelaskan pada BAB II huruf 2.3. Penyajian ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan dapat dalam bentuk table atau grafik berikut :

Tabel 1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kantor Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	KET
1	2	3	4	5
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	Rp. 2.172.148.340	Rp. 1.950.225.467	89.78	
Sasaran : Prosentase tersedianya jasa administrasi perkantoran				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,083,741,540	1,869,568,967	89.72	
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	1.579.348.340	1.402.353.436	88.79	
• Penyediaan gaji Dan Tunjangan ASN	1,539,148,340	1,362,153,436	88.50	
• Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40,200,000	40,200,000	100	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	250,378,977	215,359,293	86.01	
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/peneranga Bangunan Kantor	2,761,660	2,761,000	99.98	
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23,211,893	23,179,250	99.86	
• Penyediaan Barang	5,375,424	2,815,750	52.38	

Cetakan dan Penggandaan				
• Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				
• Fasilitas Kunjungan Tamu	28,930,000	17,004,200	58.78	
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190,100,000	169,599,093	89.22	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42,006,475	41,720,650	99.32	
• Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	42,006,475	41,720,650	99.32	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143,998,480	142,397,088	98.89	
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	10,500,000	8,909,250	84.85	
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133,498,480	133,487,838	99.99	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68,009,268	67,738,500	99.60	
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	45,300,000	45,208,500	99.80	
• Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22,709,268	22,530,000	99.21	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	72,566,800	66,866,900	92.15	
• Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	9,900,000	9,900,000	100	
• Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	21,586,800	21,580,200	99.97	

Masyakat di Wilayah Kecamatan				
• Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	41,080,000	35,386,700	86.14	
PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15,840,000	13,789,600	87.06	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	15,840,000	13,789,600	87.06	

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

Faktor – faktor penghambat dalam pencapaian target antara lain :

1. Perubahan system pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman lebih bagi aparat pengelola keuangan dan Sistim Informasi Keuangan Daerah.
2. Sebagian ASN ada yang belum mahir dalam melaksanakan program yang di rencanakan
3. Adanya beberapa kegiatan kabupaten yang tidak dilaksanakan di kecamatan Linggo Sari Baganti, dan kegiatan itu tidak terlaksana di Kerenakan tidak adanya Pencanaan dari Kabupaten untuk bias terlaksananya Bulan Bakti Gontong Royong di adakan pada tahun ini dan anggarannya tidak bisa di pergunakan lagi kerena tidak di robah waktu perobahan anggaran.
4. Disamping itu kecepatan kerja peralatan juga sangat menentukan dalam pencapaian target, seperti masalah jaringan, meskipun sudah bisa diakses dari kecamatan , tetapi kerjanya cukup lambat

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan dengan entitas pelaporan keuangan. Sedangkan Entitas Pelaporan Keuangan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan). Khusus bagi SKPD tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas disusun oleh PPKD yang dalam hal ini diemban oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Pada unit kerja yang dianggap sebagai Entitas Akuntansi adalah Perangkat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), yang merupakan pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa buah kegiatan dari suatu program sesuai dengan tupoksinya.

Adapun program dan kegiatan TA. 2024 pada Kantor Camat Linggo Sari Baganti adalah sebagai berikut :

SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN
1
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
Sasaran : Prosentase tersedianya jasa administrasi perkantoran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat daerah
• Penyediaan gaji Dan Tunjangan ASN • Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Administrasi Umum Perangkat Daerah
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/peneranga Bangunan Kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan • Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan • Fasilitas Kunjungan Tamu • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
• Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN
• Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa • Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan • Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
PROGRAM PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Ada 2 basis akuntansi yang dipakai yaitu Basis Kas (Cash Basic) dan Basis Akrua (Accrual Basic). Pada Cash Basis pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan belanja atau pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas bendaharawan. Basis Kas dipergunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrua dipergunakan dalam penyusunan Neraca dimana asset, hutang dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dan bukan pada saat kas diterima atau kas keluar.

Bagi SKPD basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan sama dengan basis yang dipakai pemerintah daerah, yaitu basis kas dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrua dalam menyusun neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang penerapan kebijakan berbasis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan (asset, kewajiban dan ekuitas dana). Yang harus diungkapkan adalah proses penetapan nilai asset, kewajiban dan ekuitas dana dengan jelas sehingga dapat menggambarkan nilai perolehan historis. Asset harus dicatat/ diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari

imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut. Kewajiban dicatat/ diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/ diukur sebesar selisih antara asset dan kewajiban.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Contoh :

- Pencatatan aset berdasarkan harga perolehan.

Telah sesuai standar akuntansi pemerintah

- Terhadap asset daerah belum dilakukan penyusutan.

Belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Bagi SKPD standar akuntansi yang dipakai sama dengan yang diterapkan pemerintah daerah secara umum. Menyangkut penerapan standar akuntansi ini akan ada penegasan dari Kepala Daerah.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos

1. Belanja

a) Belanja Pegawai

Dianggarkan sebesar Rp. **1.579.348.340** sampai 31 Desember 2024 terealisasi Rp. **1.402.353.436,-** (88.79 %) dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 2. Rincian Belanja Pegawai

RINCIAN BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
BELANJA PEGAWAI TIDAK LANGSUNG	1.539.148.340	1.362.153.436
Gaji dan Tunjangan	1.0311.777.242	858.575.077
Tambahan Penghasilan PNS	507.323.098	503.778.359
BELANJA PEGAWAI LANGSUNG	40.200.000	40.200.000
. Honor PNS	40.200.000	40.200.000
Total Belanja Pegawai		

b) Belanja Barang dan Jasa

Dianggarkan sebesar Rp. 585.440.000- terealisasi sebesar Rp. 540.512.031,- (92.33%) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Barang	216.484.675	182.730.850
2	Belanja jasa	135.920.000	134.236.588
3	Belanja Pemeliharaan	43.385.825	43.100.000
4	Belanja perjalanan dinas	180.492000	171.44.593
5	Belanja uang dan/atau jasa	9.157.500	9.000.000

	untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat		
	Jumlah	585.440.000	540.512.031

c) Belanja Modal

Dianggarkan sebesar Rp 7.360.000,- terealisasi sebesar Rp. Rp 7.360.000. dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal	7.360.000	7.360.000
	Belanja Modal Peralatn dn mesin	7.360.000	7.360.000

2. Aset

1) Aset Lancar

Kas pada bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah Rp.0,- karena UYHD per 31 Desember 2024 sebesar Rp.22.800.-. telah disetor pada tanggal 23 Desember 2024 yang terdiri dari pengembalian sisa UP sebesar Rp. 0

Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0,- yang berarti pengelolaan persediaan sudah sangat baik.

2) Aset Tetap

✓ Tanah

Saldo Awal tanah Tahun 2024 sebesar Rp.304.333.168 sepanjang Tahun 2024 tidak ada perubahan saldo tanah.

✓ Peralatan dan Mesin

Saldo awal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp. 655.084.436.- Selama TA 2024 terdapat penambahan mutasi

sebesar Rp..... sehingga Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 menjadi Rp. 662.444.436.-

✓ Bangunan dan Gedung

Tidak terdapat perubahan saldo bangunan dan gedung sepanjang TA 2024 sehingga tetap sama dengan saldo awal tahun 2024 sebesar Rp.696.700.000,-

✓ Aset Tetap Lainnya

Saldo awal Tahun 2024 Rp.629.167.- dan sepanjang Tahun 2024 tidak ada perubahan, sehingga saldo per 31 Desember 2024 tetap sebesar Rp.629.167.-

3. Ekuitas Dana

Ekuitas dana memuat informasi dan penjelasan pos ekuitas dana. Bagi SKPD yang ada hanya ekuitas dana lancar. Ekuitas dana lancar berasal dari SILPA. Tapi di Tahun 2024 kita mengkaji lebih efektif dan efisien melalui perhitungan surplus/ defisit.

URAIAN EKUITAS DANA	TAHUN 2024 (Rp)	TAHUN 2023 (Rp)
EKUITAS DANA LANCAR	1.579.667.502	1.381.964.818
Silpa	363.197.964	750.731.763
Surplus/ Defisit	1.942.865.467	2.132.696.581
EKUITAS DANA INVESTASI		
Diinvestasikan dalam asset tetap		
EKUITAS DANA UNTUK	1.950.248.267	1.745.162.783
DIKONSOLIDASIKAN		
RK PPKD	1.950.248.267	1.745.162.783
Jumlah Ekuitas Dana	370.580.764	363.197.964

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari uraian CaLK SKPD Kantor Camat Linggo Sari Baganti per 31 Desember 2024 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hambatan atau kendala yang krusial dalam pelaksanaan anggaran SKPD tahun 2024. Hanya ada sedikit kendala dalam jarak dan jaringan SIPKD, meskipun bisa diakses dari kecamatan, tetapi proses aksesnya agak lambat .

6.2. Saran

1. Peningkatan alokasi anggaran untuk tahun-tahun yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kualitas sumber daya aparatur kecamatan.
2. Diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang lebih intens tentang aturan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah, terlebih bagi aparatur yang masih baru di bidang keuangan.

Linggo Sari Baganti, 02 Januari 2025

Plt. CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



MARTIA, SE
Nip. 19861026 201001 2 009

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan SOPD Kantor Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan per 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistim pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dimana posisi keuangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

➤ Anggaran	Rp. 2.172.148.340
➤ Jumlah SP2D	Rp. 1.950.225.467
➤ Jumlah Realisasi	Rp. 1.950.225.467
➤ UYHD	Rp. 22.800

Linggo Sari Baganti, 02 Januari 2025

Pt. CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



MIL MARTASE

Nip. 19861026 201001 2 009